

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGENDALIAN MASSA
PADA SATUAN BRIMOB KOMPI 4 BATALIYON A PELOPOR
KOTA TOLI-TOLI**Mas Gunawan^{1*}, Dewi Cahyawati Abdullah², Mini³^{1,2,3}Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Panca Marga Palu, Palu, Indonesia**RIWAYAT ARTIKEL****Diterima:**
20-08-2025**Disetujui:**
12-11-2025**Dipublikasi:**
01-12-2025**Kata Kunci:**
*Komunikasi; Sumber Daya;
Disposisi; Struktur
Birokrasi***ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan pengendalian massa dalam peningkatan kinerja anggota pada Kompi 4 Batalyon A Pelopor Satuan Brimob Polda Sulawesi Tengah. Penelitian menggunakan metode kualitatif deskriptif, dengan pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Fokus penelitian adalah memahami secara mendalam bagaimana kebijakan pengendalian massa diterapkan di lapangan serta faktor-faktor yang memengaruhi efektivitas pelaksanaannya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan pengendalian massa dipengaruhi oleh empat faktor utama, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi pelaksana, dan struktur birokrasi. Komunikasi yang jelas dan konsisten memungkinkan pelaksana dan masyarakat memahami maksud dan tujuan kebijakan. Dukungan sumber daya yang memadai, termasuk staf, fasilitas, dan wewenang, menjadi prasyarat agar kebijakan dapat dilaksanakan secara efektif. Disposisi pelaksana, yang meliputi sikap, komitmen, dan pemahaman kebijakan, menentukan keberhasilan pelaksanaan. Struktur birokrasi, termasuk prosedur operasi standar (SOP) dan mekanisme koordinasi, menjadi pedoman bagi pelaksana serta memfasilitasi hubungan yang efektif antara aparat dan masyarakat. Penelitian ini menyimpulkan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan pengendalian massa tidak hanya bergantung pada desain kebijakan, tetapi juga pada kesiapan organisasi, kemampuan dan sikap pelaksana, serta koordinasi yang baik. Temuan ini menjadi dasar bagi upaya peningkatan kinerja anggota Brimob dalam pengendalian massa sehingga kebijakan dapat diterapkan secara optimal dan memberikan hasil yang maksimal bagi keamanan dan ketertiban masyarakat.

PENDAHULUAN

Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI) merupakan lembaga eksekutif yang bertanggung jawab atas keamanan negara di seluruh wilayah Indonesia. POLRI memiliki peran strategis dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan publik, serta membina ketentraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, sebagaimana diatur dalam Pasal 2, Pasal 4, dan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Peran POLRI dapat dilihat dari dua aspek, yaitu organisasional dan personal. Aspek organisasional berkaitan dengan kelembagaan POLRI secara keseluruhan, sedangkan aspek personal berfokus pada anggota POLRI yang menjalankan fungsi, tugas, dan tanggung jawab

organisasi. Pertanggungjawaban organisasi dan individu di POLRI memiliki dua dimensi, yaitu akuntabilitas—sebagai realisasi otorisasi yang diperoleh—dan responsibilitas—sebagai kewajiban hukum yang harus dilaksanakan.

Anggota POLRI memiliki peran sentral dalam menjaga ketertiban masyarakat, melakukan pencegahan, serta menindak perilaku yang mengganggu ketentraman publik. Profesionalisme anggota POLRI menjadi kunci, bukan hanya melalui kemampuan teknis di lapangan, tetapi juga melalui penerapan prinsip-prinsip kepolisian yang demokratis dan menjunjung tinggi integritas. Hal ini sangat penting terutama dalam pengamanan unjuk rasa atau demonstrasi, di mana aparat harus menyeimbangkan fungsi pengamanan, pengayoman, dan perlindungan terhadap pengunjuk rasa, sesuai hak konstitusional mereka untuk menyampaikan pendapat.

Pengendalian massa (Dalmas) merupakan salah satu fungsi khusus POLRI, terutama di Satuan Brimob, yang menangani situasi unjuk rasa untuk mencegah gangguan ketertiban umum dan potensi perbuatan anarkis. Tahapan penggunaan kekuatan dalam pengendalian massa telah diatur secara rinci dalam Peraturan Kapolri Nomor 1 Tahun 2009, mulai dari langkah preventif hingga penggunaan senjata sesuai tingkat ancaman. Setiap tahap diiringi komunikasi lisan untuk membujuk dan memperingatkan peserta aksi agar tetap tertib.

Fenomena unjuk rasa yang meningkat di era reformasi menunjukkan masyarakat kini lebih aktif mengekspresikan pendapat dan menuntut haknya. Salah satu contoh terkini adalah unjuk rasa yang dilakukan masyarakat dan mahasiswa di Kabupaten Buol pada Pilkada 2024, yang awalnya damai tetapi berpotensi menimbulkan tindakan anarkis setelah melewati jam yang ditentukan. Dalam konteks ini, keberadaan Kompi 4 Batalyon A Pelopor Satuan Brimob Kota Toli-Toli menjadi sangat penting untuk mengendalikan situasi secara profesional sesuai prosedur dan hukum yang berlaku.

Berdasarkan fenomena tersebut, penelitian ini bertujuan untuk memahami secara mendalam implementasi kebijakan pengendalian massa dalam meningkatkan kinerja anggota Satuan Brimob Kompi 4 Bataliyon A Pelopor Kota Toli-Toli. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif, yang menekankan pengamatan, wawancara, dan dokumentasi untuk memperoleh gambaran komprehensif mengenai praktik pengendalian massa, faktor-faktor yang memengaruhi efektivitas kebijakan, serta dampaknya terhadap kinerja anggota Brimob dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat.

KAJIAN PUSTAKA

Implementasi kebijakan merupakan proses penerapan kebijakan yang bertujuan mewujudkan sasaran yang telah ditetapkan. Menurut Schneider & Ingram (2017), implementasi berbeda dengan perencanaan karena sering terjadi distorsi dalam pelaksanaannya, sehingga menjadi tantangan bagi pelaksana agar kebijakan dapat diterapkan secara efektif. Intinya, implementasi adalah interaksi antara penentuan tujuan dan tindakan nyata untuk mencapainya, yang menekankan pentingnya hubungan antar aktor dan mata rantai kegiatan dalam organisasi (Salve et al., 2018). Unsur utama implementasi kebijakan meliputi proses sebagai rangkaian aktivitas, tujuan sebagai sasaran yang ingin dicapai, serta hasil dan dampak yang dirasakan oleh kelompok sasaran (Van Meter & Van Horn, dalam Syahrudin, 2018).

Pelaksanaan kebijakan publik dapat dilakukan secara langsung melalui program kebijakan atau melalui kebijakan turunan dalam bentuk proyek, kegiatan, dan peraturan pelaksana seperti keputusan presiden, menteri, atau kepala daerah (Nugroho, 2016). Implementasi juga terkait erat dengan misi, visi, strategi, program, dan proyek organisasi, serta memerlukan evaluasi dan umpan balik agar kebijakan dapat berjalan sesuai dengan desain yang ditetapkan. Keberhasilan implementasi dipengaruhi oleh komunikasi, ketersediaan sumber daya, disposisi pelaksana, dan struktur birokrasi (Syahrudin, 2018).

Dalam konteks organisasi, variabel yang memengaruhi implementasi mencakup perilaku organisasi dan antarorganisasi, perilaku birokrasi level bawah, serta perilaku kelompok sasaran (Fidarina & Megawati, 2022). Implementasi yang efektif memerlukan koordinasi dan komitmen antarorganisasi, sementara birokrasi level bawah memiliki peran penting dalam menjalankan program melalui diskresi dan interaksi langsung dengan masyarakat (Lipsky, 1980). Kelompok sasaran juga memengaruhi keberhasilan implementasi melalui respon positif maupun negatif terhadap kebijakan, yang bergantung pada kesesuaian kebijakan dengan harapan mereka dan efektivitas komunikasi.

Di bidang kepolisian, polisi merupakan aparat penegak hukum yang bertugas memelihara keamanan dan ketertiban umum serta menjaga keseimbangan antara hak individu dan kepentingan masyarakat luas (Reith; Poerwodarmita). Di Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) diatur dalam UU Nomor 2 Tahun 2002, yang terdiri atas anggota Polri dan pegawai negeri sipil, dipimpin oleh Kapolri yang bertanggung jawab atas penyelenggaraan fungsi kepolisian. Salah satu fungsi khusus Polri adalah pengendalian massa atau Dalmas, yang berperan menjaga ketertiban saat unjuk rasa atau demonstrasi, mencegah gangguan potensial menjadi ancaman nyata, serta menyeimbangkan hak kebebasan masyarakat dengan kepentingan orang lain (UU No. 2/2002; Perkap No. 16/2006).

METODE

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif untuk memperoleh pemahaman mendalam terkait implementasi kebijakan pengendalian massa dalam peningkatan kinerja anggota pada Satuan Brimob Kompi 4 Batalyon A Pelopor Kota Toli-Toli. Penelitian dilakukan dengan mengamati perilaku dan objek tertentu dalam waktu yang telah ditentukan, sehingga kondisi yang terjadi dapat dianalisis secara mendalam.

Menurut Pasolong (2013), penelitian deskriptif adalah penelitian yang bertujuan mendeskripsikan fenomena yang terjadi pada saat penelitian berlangsung, termasuk mencatat, menganalisis, dan menginterpretasi kondisi yang ada. Penelitian ini tidak bertujuan menguji hipotesis, melainkan menggambarkan informasi secara objektif. Biasanya, penelitian deskriptif menggunakan pertanyaan yang diawali kata “bagaimana” (Sugiyono, 2010).

Moleong (2012) menjelaskan bahwa penelitian kualitatif bertujuan memahami fenomena yang dialami subjek, seperti perilaku, persepsi, motivasi, atau tindakan, secara holistik dalam konteks alami dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah. Lebih lanjut, Sugiyono (2010) menyatakan bahwa metode deskriptif kualitatif dilakukan dengan tahap penjelajahan menyeluruh terhadap objek penelitian, mendeskripsikan segala hal yang dilihat, didengar, dan dirasakan.

Dengan pendekatan ini, penelitian bertujuan mengidentifikasi dan mendeskripsikan implementasi kebijakan pengendalian massa pada Satuan Brimob Kompi 4 Batalyon A Pelopor Kota Toli-Toli secara komprehensif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kompi 4 Batalyon A Pelopor Satuan Brimob Polda Sulawesi Tengah merupakan salah satu unit kerja di bawah struktur Batalyon A Pelopor yang berlokasi di Kabupaten Tolitoli. Kompi ini terlibat dalam berbagai tugas operasi kepolisian di wilayah Sulawesi Tengah, termasuk Kabupaten Buol dan Kabupaten Tolitoli, dengan fokus pada pengendalian keamanan di daerah rawan konflik atau tingkat kerawanan tinggi. Kompi 4 Batalyon A Pelopor dibentuk pada tanggal 14 Februari 2014, dengan pergeseran pasukan dari wilayah lain sebagai bagian dari penguatan tugas satuan Brimob di Sulteng, dan dipimpin oleh AKP Aris Hardiatno sebagai DPP. Pembentukan kompi ini ditujukan untuk mendukung fungsi Brimob sebagai satuan elite polisi yang memiliki tugas khusus, seperti penanggulangan terorisme, pemberantasan kejahatan

terorganisir, penanggulangan bencana, serta pengamanan objek vital negara. Dengan keberadaannya, Kompi 4 diharapkan mampu memberikan respons cepat terhadap ancaman atau gangguan keamanan.

Dalam implementasi kebijakan pengendalian massa, beberapa faktor utama memengaruhi efektivitas pelaksanaan di Kompi 4 Batalyon A Pelopor. Pertama, komunikasi kebijakan menjadi aspek krusial. Lukas et al. (2020) menyebut komunikasi kebijakan sebagai penyampaian pesan, program, dan gagasan pemerintah kepada masyarakat dan para pelaksana. Transformasi kebijakan yang jelas, konsisten, dan dapat dipahami para pelaksana serta kelompok sasaran memengaruhi kemampuan mereka menjalankan kebijakan secara tepat. Berdasarkan hasil wawancara dengan informan, komunikasi yang tidak optimal dapat menghambat pelaksanaan kebijakan, sementara komunikasi yang efektif memungkinkan tujuan kebijakan tercapai secara maksimal.

Kedua, sumber daya merupakan faktor penentu lain. Menurut Edward III (dalam Syahrudin, 2018), sumber daya mencakup jumlah dan kemampuan staf, informasi, wewenang, serta fasilitas pendukung. Dalam konteks Kompi 4, staf yang terlatih dan fasilitas memadai memungkinkan pelaksanaan kebijakan menanggapi situasi dengan cepat dan tepat. Tanpa dukungan sumber daya yang memadai, pelaksanaan kebijakan akan sulit tercapai sesuai tujuan organisasi, terutama dalam konteks pengendalian massa yang membutuhkan kesiapan operasional tinggi.

Ketiga, disposisi pelaksana memengaruhi keberhasilan implementasi. Wahab (2010) menyebut disposisi sebagai karakter dan sikap implementor, termasuk komitmen, kejujuran, dan sifat demokratis. Berdasarkan hasil penelitian, disposisi muncul ketika pelaksana menyadari bahwa kebijakan tidak hanya menguntungkan organisasi tetapi juga diri mereka sendiri. Pengetahuan dan pemahaman mendalam terhadap kebijakan memunculkan sikap menerima, netral, atau menolak, yang pada gilirannya menentukan efektivitas pelaksanaan kebijakan di lapangan.

Keempat, struktur birokrasi juga memegang peranan penting. SOP (Standard Operating Procedures) menjadi pedoman bagi setiap pelaksana untuk bertindak. Kebijakan publik yang kompleks membutuhkan proses implementasi yang sistematis agar tujuan dan perumusan kebijakan tercapai. Hubungan konsisten antara pemerintah dan aparat, koordinasi yang baik, serta sosialisasi SOP kepada masyarakat, menjadi mekanisme penting agar pengendalian massa dapat dilakukan secara efektif. Berdasarkan observasi, SOP terkait pemberian sanksi kepada masyarakat belum disosialisasikan secara optimal, sehingga masyarakat belum sepenuhnya memahami konsekuensi saat melanggar aturan, yang dapat memengaruhi perilaku mereka dalam aksi unjuk rasa.

Dengan demikian, implementasi kebijakan pengendalian massa pada Kompi 4 Batalyon A Pelopor Polda Sulteng menunjukkan interaksi kompleks antara komunikasi, sumber daya, disposisi pelaksana, dan struktur birokrasi. Keberhasilan implementasi kebijakan tidak hanya bergantung pada desain kebijakan itu sendiri, tetapi juga pada kapasitas organisasi, kesiapan staf, pemahaman dan sikap pelaksana, serta mekanisme koordinasi yang jelas antara aparat dan masyarakat.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa implementasi kebijakan pengendalian massa pada Kompi 4 Batalyon A Pelopor Satuan Brimob Polda Sulawesi Tengah merupakan proses yang kompleks dan multidimensional. Keberhasilan implementasi kebijakan ini sangat dipengaruhi oleh empat faktor utama, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi pelaksana, dan struktur birokrasi.

Komunikasi yang jelas, konsisten, dan efektif memungkinkan pelaksana kebijakan serta masyarakat memahami maksud, tujuan, dan substansi kebijakan, sehingga implementasi dapat berjalan sesuai rencana. Dukungan sumber daya yang memadai, baik berupa staf, fasilitas,

informasi, maupun wewenang, menjadi prasyarat penting agar kebijakan dapat dilaksanakan secara cepat dan tepat. Disposisi pelaksana, yang mencakup sikap, komitmen, dan pemahaman terhadap kebijakan, menentukan sejauh mana kebijakan dijalankan sesuai tujuan pembuat kebijakan. Sementara itu, struktur birokrasi, termasuk prosedur operasi standar (SOP) dan mekanisme koordinasi, menjadi pedoman bagi pelaksana dan memfasilitasi hubungan yang efektif antara aparat dan masyarakat.

Secara keseluruhan, implementasi kebijakan pengendalian massa pada Kompi 4 Batalyon A Pelopor menunjukkan bahwa keberhasilan kebijakan tidak hanya bergantung pada desain kebijakan itu sendiri, tetapi juga pada kesiapan organisasi, kemampuan pelaksana, pemahaman dan sikap mereka, serta mekanisme koordinasi yang jelas. Oleh karena itu, upaya peningkatan kinerja anggota Brimob dalam pengendalian massa harus memperhatikan keempat faktor tersebut agar kebijakan dapat diterapkan secara optimal dan memberikan hasil yang maksimal bagi keamanan dan ketertiban masyarakat.

REFERENSI

- Fidarina, N. R., & Megawati, S. (2022). Implementasi Kebijakan Pusat Inkubasi Bisnis di Universitas Negeri Surabaya. *Publika*, 10(4), 1283-1292. <https://doi.org/10.26740/publika.v10n4.p1283-1292>
- Lipsky, M. (1980). *Street-Level Bureaucracy: Dilemmas of the Individual in Public Service*. Russell Sage Foundation.
- Lukas, K., Pasoreh, Y., & Golung, A. M. (2020). Peranan Komunikasi Pemerintahan dalam Membangun Citra Kepemimpinan di Desa Ponompiaan Kecamatan Dumoga Kabupaten Bolaang-Mongondow. *Acta Diurna Komunikasi*, 2(1). Retrieved from <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/actadiurnakomunikasi/article/view/27109>
- Moleong, L. J. (2012). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Remaja Rosdakarya.
- Nugroho, R. (2016). *Kebijakan Publik di Indonesia*. Pustaka Pelajar.
- Pasolong, H. (2013). *Metode Penelitian Administrasi Publik*. Alfabeta.
- Salve, S., Harris, K., & Sheikh, K. (2018). Understanding the Complex Relationships among Actors Involved in the Implementation of Public-Private Mix (PPM) for TB Control in India, Using Social Theory. *Int J Equity Health*, 17, 73. <https://doi.org/10.1186/s12939-018-0785-1>
- Schneider, A., & Ingram, H. (2017). Framing the Target in Policy Formulation: The Importance of Social Constructions. In M. Howlett & I. Mukherjee (Eds.), *Handbook of Policy Formulation* (pp. 320–336). Cheltenham, UK: Edward Elgar.
- Sugiyono, S. (2010). *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.
- Syahrudin, S. (2018). *Implementasi Kebijakan Publik: Konsep, Teori dan Studi Kasus*. Nusa Media.
- Wahab, S. A. (2010). *Analisis Kebijaksanaan: Dari Formulasi ke Implementasi Kebijaksanaan*. Kencana.